

## PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Achmad Fauzi<sup>1</sup>, Enny Widayati<sup>2</sup>, Tigha Anaku Putri<sup>3</sup>, Indra Adib Abiyah<sup>4</sup>, Maharani Sasmitha<sup>5</sup>,  
Rifqi Maulana<sup>6</sup>, Tazkia Aulia<sup>7</sup>, Adam Herdinov<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Ekonomi, [ahmad\\_fauziok@yahoo.com](mailto:ahmad_fauziok@yahoo.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

<sup>2</sup>Wakil Rektor III, [Enny18juli@gmail.com](mailto:Enny18juli@gmail.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

<sup>3</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi, [ighaanaku09@gmail.com](mailto:ighaanaku09@gmail.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

<sup>4</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi, [iaabiyah22@gmail.com](mailto:iaabiyah22@gmail.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

<sup>5</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi, [maharanisasmitha@gmail.com](mailto:maharanisasmitha@gmail.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

<sup>6</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi, [rifqi1782@gmail.com](mailto:rifqi1782@gmail.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

<sup>7</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi, [tazkiaaulia00@gmail.com](mailto:tazkiaaulia00@gmail.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

<sup>8</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi, [adamherdinov12@gmail.com](mailto:adamherdinov12@gmail.com), Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

### ABSTRACT

*One of the most important parts of the economy in this country is the payment system. Besides that, the payment system also plays an important role in maintaining the stability of state finances. To claim the smoothness and security of the payment system. Bank Indonesia implements policies focused on 4 primary themes, namely increasing security, efficiency, expanding the use of payment systems and focusing on consumer protection. Therefore, this study aims to identify and analyze Indonesia's payment system arrangements with Bank Indonesia in the era of developing digital technology, and this study uses a qualitative method which is based on (Creswell, J.W) "A qualitative method is research used to examine human and social problems". With that, the Indonesian bank also has a sizeable responsibility for the smooth running of the payment system. Advances in telecommunications science and technology, information technology also greatly support trade in goods and services between regions, even between countries. And based on. Such progress is very useful in fulfilling a person's need for goods and services to achieve the desired goals. The payment system can be done with a variety of media, the transaction media that can be used can be done manually (simple) or using advanced technology (complex), moreover, technology is now increasingly skyrocketing, automatic transaction methods in this country are also developing. Payment systems that develop follow the evolution of money, using 3 driving factors, namely technological innovation and business models, community traditions, and government policies.*

**Keywords:** Bank Indonesia, Payment System, Technology Development

### ABSTRAK

Bagian terpenting dalam perekonomian pada negara ini galat satunya ialah sistem pembayaran. Disamping itu sistem pembayaran jua berperan penting pada menjaga kestabilan keuangan negara. Buat mengklaim kelancaran serta keamanan sistem pembayaran. Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang difokuskan pada empat tema primer yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, ekspansi penggunaan sistem pembayaran serta fokus diproteksi konsumen. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan sistem pembayaran Indonesia dengan Bank Indonesia pada era teknologi digital yang berkembang, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana berdasarkan dari (Creswell, J. W) "Metode kualitatif ialah penelitian yang dipergunakan untuk meneliti persoalan manusia serta sosial". Dengan itu Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab yang cukup akbar atas kelancaran sistem pembayaran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi, teknologi info juga sangat mendukung perdagangan barang serta jasa antar wilayah, bahkan antar negara. Kemajuan seperti itu sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan seorang akan barang dan jasa mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pembayaran mampu dilakukan dengan beranekaragam media, media transaksi yang dapat digunakan bisa dengan cara manual (sederhana) ataupun memakai teknologi canggih (kompleks), lebih lagi teknologi ini semakin meroket, otomatis cara transaksi pada negara ini jua berkembang. Sistem pembayaran yang berkembang mengikuti evolusi uang, menggunakan 3 faktor pendorong, yaitu penemuan teknologi dan model usaha, tradisi masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci:** Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, Perkembangan Teknologi

### 1. PENDAHULUAN

Pada mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran ialah tugas utama bank Indonesia dengan adanya otoritas jasa keuangan membantu bank Indonesia agar menjalankan fungsi mikro sertamakroprudensial untuk mengatur dan menjaga stabilitas sistem pembayaran dan keuangan. Menjaga serta menstabilkan sistem pembayaran memang wajib dilakukan dimasing-masing negara termasuk Indonesia, maka dengan ini Bank

Indonesia artinya “lembaga negara yang independen pada melaksanakan tugas serta wewenangnya, bebas berasal campur tangan Pemerintah serta/atau pihak lain, kecuali buat hal-hal yang secara tegas diatur pada Undang-undang ini. badan aturan sesuai undang-undang ini. Berdasarkan (Mohammad Mushlehudin 2014) “bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti kepingan papan yang dipergunakan menjadi kawasan meletakan yaitu homogen meja”. Berdasarkan (pasal 23D Undang- Undang Republik Indonesia) Bank Indonesia artinya Bank Sentral Republik Indonesia.

Berdasarkan (A, Abdurrachman 2014) “ Bank ialah suatu jenis forum keuangan yang melaksanakan beraneka macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, supervisi terhadap mata uang, bertindak menjadi kawasan penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perjuangan perusahaan- perusahaan”. Teknologi berkembang seiring menggunakan terjadinya perubahan asal masa ke masa yang diadaptasi menggunakan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya teknologi peranan uang tunai telah jarang dipergunakan oleh masyarakat serta digantikan dengan system pembayaran yang lebih terkini yaitu non-tunai yang menghasilkan transaksi lebih efisien. Sistem pembayaran non-tunai berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi.”

Berdasarkan dari (Munaroh M,2019) “Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai electronic money (e-money). Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.”

Berdasarkan dari (Subari A, 2017) “Pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggaraan, serta pengawasan dalam rangka mengontrol resiko, baik yang diakibatkan oleh transaksi harian, seperti resiko likuiditas dan resiko kredit maupun resiko yang bersifat sistematis. Pembayaran tunai tinggi dalam volume namun terus menurun persentasenya, sedangkan pembayaran non-tunai meningkatkan. Semakin berkembang suatu perekonomian, peran sistem pembayaran non-tunai semakin penting. Dengan adanya perkembangan tersebut, pembahasan sistem pembayaran lebih banyak terkait dengan instrumen non-tunai dan menggunakan instrumen yang berbasis dokumen maupun elektronik.”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Sistem Pembayaran**

Berdasarkan dari (Listfield dan Montes Negretin Laila Ramadhani, 2016) “Sistem pembayaran artinya peraturan, baku serta indera yang dipergunakan agar pertukaran nilai ekonomi antara 2 pihak untuk menghindari kewajiban. Berdasarkan dari (Rossa Fadhila, 2020) “Sistem pembayaran artinya sistem yang meliputi seperangkat hukum, forum, serta prosedur yang digunakan agar mentransfer dana untuk memenuhi kewajiban yang ada berasal kegiatan ekonomi”. Keberhasilan sistem pembayaran mendukung perkembangan sistem keuangan serta perbankan, kebalikannya risiko instabilitas atau kegagalan sistem pembayaran berdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian secara umum. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan serta pemeliharaan keamanan serta kelancaran sistem pembayaran oleh forum dan umumnya oleh bank sentral. Keterlibatan bank sentral pada sistem pembayaran suatu negara ditentukan oleh ciri sosial ekonomi negara tersebut. Bank sentral bisa bertindak menjadi pengatur, pengawas, atau pengelola sistem pembayaran.

Sistem pembayaran menjadi bagian asal infrastruktur keuangan yang terkait guna transfer dana mempengaruhi dan menyampaikan kontribusi yang signifikan terhadap akselerasi serta ekspansi inklusi keuangan menjadi bentuk implementasi taktik inklusi keuangan nasional. Memastikan kelancaran sistem pembayaran artinya kebutuhan yang tak dapat dipungkiri ketika ini seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Bagi Bank Indonesia, hal ini ialah tanggung jawab sekaligus tantangan. Tujuan penelitian ini merupakan buat tahu serta menganalisis pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia pada era teknologi digital yang berkembang. Penelitian ini memakai pendekatan aturan normatif melalui kajian pustaka berasal banyak sekali asal bahan hukum. Pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia pada era perkembangan teknologi digital dilakukan dengan mengacu di lima visi sistem pembayaran Indonesia 2025 dalam SPI Track 2025.

## 2.2 Sejarah Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran berkembang seiring uang berkembang serta mempunyai tiga unsur penggerak, yaitu penemuan teknologi serta contoh usaha, tradisi masyarakat serta kebijakan pemerintah. Semula, sistem pertukaran antar barang dagangan difungsikan menjadi indera pembayaran. Persoalan hanya timbul waktu dua pihak yang ingin bertukar tak sepakat perihal nilai tukar atau pihak lain tidak terlalu membutuhkan barang yang ditukar. Agar mengatasinya, insan mengembangkan uang panas.

Barang-barang di sini ialah kebutuhan utama yang diperlukan hampir semua orang, seperti garam, teh, tembakau, serta biji-bijian. Sapi didomestikasi antara 900 serta 6000 SM. Tepung terigu, sayuran, serta tanaman terus dipergunakan menjadi komoditas setelah munculnya budaya pertanian. Selain itu, darisekitar 1200 SM Uang primitif SM dalam bentuk cangkang atau cangkang hewan lainnya dipergunakan. Orang Cina mulai membentuk tiruan cangkang cowrie dari logam serta tembaga. kurang lebih 100 SM raba kulit rusa putih menggunakan banyak sekali berukuran dan warna jua dipergunakan menjadi alat pembayaran. Uang kertas digunakan sebagai alat pembayaran. Swedia ialah negara pertama di benua Eropa yang menggunakan uang kertas pada tahun 1661, setelah pabrik kertas didirikan pada Spanyol di tahun 1150.

## 2.3 Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran. Undang-Undang Bank Indonesia {No. 23 Tahun 1999} menyebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yaitu memperluas, mempercepat dan jika perlu mengatur transaksi simpanan dan mengatur pemrosesan antar bank. Untuk itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan tata cara penyelenggaraan, mengatur, melaksanakan, dan memberikan izin, lisensi, dan pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran. Berdasarkan dari (Bank Indonesia, 2022) Peranan bank indonesia adalah:

### 1. Mengatur serta mendampingi pembangunan

Bank Indonesia memiliki kekuatan spesifik dalam perekonomian Indonesia. salah satu misi primer Bank Indonesia artinya mengatur dan memfasilitasi sistem pembayaran yang dipergunakan di Indonesia. Regulator Bank Indonesia bertugas memastikan seluruh proses pada sistem pembayaran berjalan lancar. Caranya adalah menggunakan mengeluarkan peraturan, persyaratan, serta hukuman yg mengikat penyedia jasa keuangan. norma penggunaan sistem pembayaran, mulai dari transfer uang, bank serta kartu kredit sampai QRIS diatur buat meminimalisir risiko penyalahgunaan. contohnya artinya Peraturan Bank Indonesia angka {20/6/PBI/2018} tentang uang elektro. Belakangan, Bank Indonesia juga sebagai mediator yang berarti memperbaiki sistem pembayaran yang ada. intinya, Bank Indonesia bertugas buat memastikan semua transaksi berjalan lancar.

### 2. Berikan izin yang tepat

galat satu kegiatan primer Bank Indonesia pada bidang sistem pembayaran ialah penerbitan izin perjuangan serta badan perjuangan. Bank Indonesia tidak secara sewenang-wenang mengizinkan pihak atau perusahaan manapun buat mendistribusikan produk atau layanan keuangan. Hal ini jua dilakukan oleh {PBI No.23/6/PBI/2021} serta {PBI No.23/7/PBI/2021}. Hal ini sejalan dengan peran Bank Indonesia pada melindungi aktivitas ekonomi warga Indonesia. oleh sebab itu, sebelum menitipkan dana langsung atau usaha Anda kepada bank atau penyedia jasa keuangan, pastikan Anda telah menerima persetujuan asal Bank Indonesia.

### 3. Menjadi pengatur

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, Bank Indonesia berperan krusial menjadi penjaga hak serta kewajiban rakyat negara Indonesia pada aktivitas ekonomi. sang sebab itu, Bank Indonesia harus memikul tanggung jawab menjadi pengendali sistem pembayaran Indonesia. Selain pemantauan di lapangan, Bank Indonesia pula mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran, baik bank umum juga fintech, buat menyerahkan log. pengawasan membantu melindungi bank, bisnis dan pemangku kepentingan, dan rakyat. Bank Indonesia juga bertujuan buat menjaga stabilitas sistem keuangan dan menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran waktu ini. contohnya, sistem QRIS diatur oleh Bank Indonesia.

### 4. Mitigasi risiko pada sistem pembayaran

Selain itu, peran Bank Indonesia pada sistem pembayaran jua termasuk memitigasi risiko gagal bayar. Tak diragukan lagi bahwa kelancaran sistem pembayaran akan sulit waktu terjadi gagal bayar. Perekonomian Indonesia bisa stagnan Bila banyak pihak terkena dampaknya secara bersamaan. buat menghindari konflik berfokus tadi, Bank Indonesia terus menyebarkan mekanisme yang dapat memitigasi banyak sekali risiko pada sistem pembayaran. Selain itu, risiko ini semakin tinggi dari hari ke hari. Bank Indonesia jua memperkenalkan Real Time Gross Settlement (RTGS) yang mempertinggi keamanan serta kecepatan sistem pembayaran real time.

5. Sebagai penyelenggara

Pos Indonesia sebelumnya menjabat menjadi pengelola sistem pembayaran, tetapi sekarang kiprah tadi diambil alih sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Baik transaksi tunai maupun digital kini semakin banyak digunakan. kenyataan ini memperkuat peran Bank Indonesia pada sistem pembayaran. Bank Indonesia sebenarnya memakai 2 sistem pembayaran yaitu Sistem Bank Indonesia National Settlement (SKNBI) serta Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) yg sudah dibahas di bagian sebelumnya.

**Tabel 1. Relevan Peneliti Terdahulu**

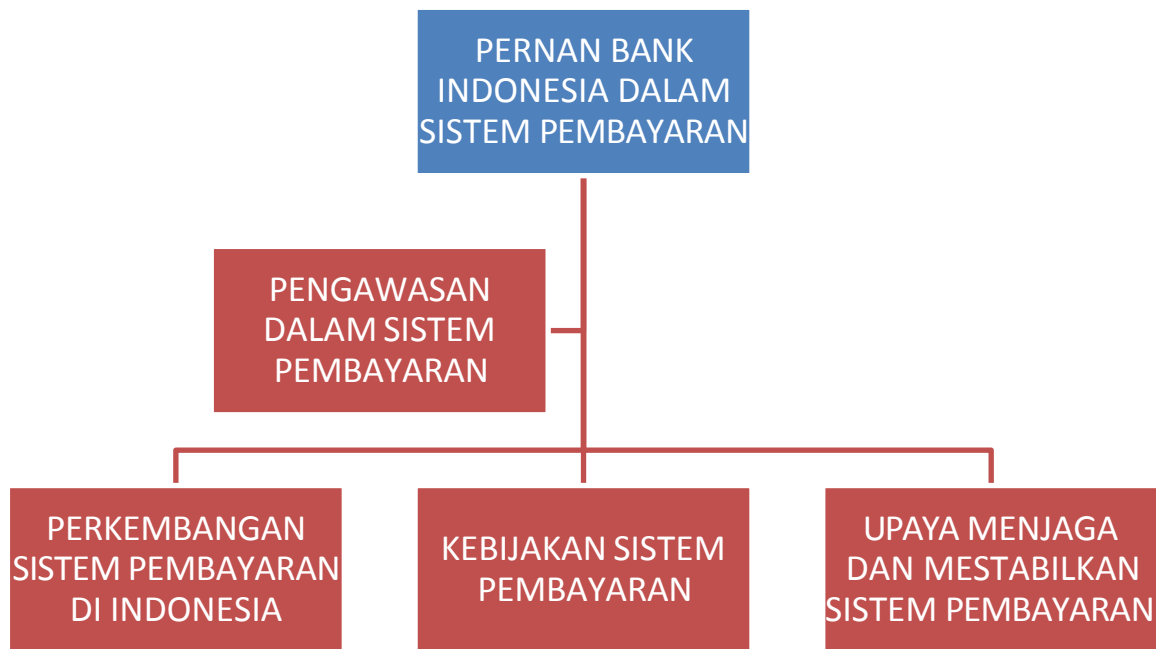
No.	Author	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1.	“Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia” <b>Paulus.H., Darminto., Susila.Y., Atmaja., (2022).</b>	“Sistem pembayaran, teknologi digital, pengaturan system pembayaran Indonesia oleh bank Indonesia di era perkembangan teknologi digitalisasi”	“Meneliti tentang Bank Indonesia dan Sistem Pembayaran”	“Berbeda tentang meneliti dan peraturan didigitalisasi”
2.	“Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19” <b>Talbani.F., Meutia., DKK., (2021).</b>	“Pandemi covid-19, Bank Indonesia, Stabilitas system keuangan”	“Peranan Bank Indonesia dalam menjaga system ”	“Berbeda objek yang diteliti”
3.	“Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia” <b>Iswanto. B., (2016).</b>	“Upaya Desain Politik Ekonomi Islam Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Internalisasi Nilai Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, Institusi di Luar Perbankan Syariah yang Mempengaruhi Perkembangan Produk Hukum Ekonomi Islam, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI)”	“Membahas tentang Bank Indonesia dan Peranan Bank Indonesia”	“Berbeda objek yang teliti”
4.	“Peranan Bank Indonesia(BI) Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran Dan Melindungi nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Skimming” <b>Arista.F.R., (2020).</b>	“Bank indonesia, Bank Syariah, system pembayaran, tindak kejahatan perbankan, tindak kejahatan pada nasabah, tindak kejahatan skimming”	“ Peranan Bank Indonesia(BI), menjaga system pembayaran”	“Berbeda cara pencatatan dan objek yang diteliti”

5.	“Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke Non-Tunai/Online Payment Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi pada UMKM di Yogyakarta)” <b>Roslina.E., (2020).</b>	“Instrumen pembayaran non- tunai, financial teknologi, system pembayaran, pembayaran online, e-commerce”	“Sitem pembayaran dari tunai/non-tunai”	“Berbeda pada pembahasan di era industri dan UMKM”
6.	“Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” <b>Tawakalni. Dewani.I., (2020).</b>	“Sistem pembayaran, Bank Indonesia, Kartu debit/kredit, e- money, pertumbuhan ekonomi”	“Membahas tentang system pembayaran, bank indonesia”	“Berbeda pada penulisan jurnal, metode jurnal, dan objek yang diteliti”
7.	“Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru” <b>Abidin.S.M., (2014).</b>	“E-money, system pembayaran, bank indonesia”	“E-money(non-tunai), system pembayaran, bank indonesia”	“Berbeda pada objek yang diteliti dan pembahasan utama jurnal”
8.	“Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” <b>Tawakalni. Dewani.I., (2020).</b>	“Sistem pembayaran, kartu ATM/debet, kartu kredit, e- money, pertumbuhan ekonomi”	“Sistem pembayaran (non-tunai) di Indonesia”	“Berbeda dalam pencatatan dan dalam pembahasan pertumbuhan ekonomi”
9.	Pengaruh Sistem “Pembayaran Non Tunai Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” <b>Mahendra.O.C., (2019).</b>	“Pertumbuhan ekonomi, inflasi, system pembayaran non-tunai, kartu debit, kartu kredit, kebijakan moneter ”	“Membahas system pembayaran (non-tunai)”	“Berbeda pencatatan dalam jurnal dan metode penelitian”
10.	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Bank Umum Kota Surakarta” <b>Hanidi.N., Sukirman., Prabowo.R.R., (2013).</b>	“Kinerja system informasi akuntansi, bank umum/sentral”	“Membahas tentang bank umum/sentral”	“Berbeda objek yang di teliti dalam jurnal dan beda metode penulisan”

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengumpulkan dan mengamati jurnal pembahasan Bank Indonesia yang didukung oleh data yang tersedia. (Sugishirono 2015), “peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kondisi objek yang natural.” Berdasarkan survei literatur, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif menggunakan lima jenis pendekatan: studi kasus, deskriptif, fenomenologis, etnografis, grounded theory dan biografi.

#### Gambar 1 CONCEPTUAL FRAMEWORK



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari kajian literatur dan penelitian yang kami lakukan, kami fokus pada pembahasan. Berikut adalah

##### 4.1 Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

Perkembangan sistem pembayaran di setiap negara akan berbeda-beda tergantung pada situasi ekonomi dan sistem keuangan masing-masing negara. Pada awalnya banyak layanan sistem pembayaran di Indonesia yang diimplementasikan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia. Namun, seiring dengan semakin populernya sistem perbankan di Indonesia, penerapan sistem pembayaran melalui sistem perbankan mulai dilakukan. Bahkan hingga saat ini, sistem perbankan masih mendominasi perannya dalam sistem pembayaran. Sedangkan perkembangan teknologi juga sangat pesat, dan tentunya dengan perkembangan teknologi tersebut sistem pembayaran juga akan semakin meningkat di era digital saat ini (2023) dan seterusnya. Jenis sistem pembayaran di Indonesia:

##### 1. Sistem Pembayaran Tunai

Berdasarkan dari (Yulia Margaretha Manullang, 2018) “menjelaskan bahwa pembayaran tunai ialah hal yang awam di Indonesia. Pembayaran tunai terutama berupa mata uang kertas dan logam. di Indonesia, mata uang masih memegang peranan krusial pada pembayaran, terutama transaksi bernilai rendah.”

##### 2. Sistem Pembayaran Non-Tunai

Berdasarkan dari (Laila Ramadani, 2016) “mengungkapkan bahwa sistem pembayaran nontunai ialah layanan pembayaran nontunai yang dilakukan oleh bank serta forum selain bank, serta untuk prosestransmisi data, operasi setelmen serta sistem setelmen tersedia dan bisa terjadi sistem BI-RTGS Indonesia (Real Time Gross Settlement) dan oleh sistem pemrosesan.”

Serta berdasarkan dari (Yulia Margaretha Manullang, 2018) mengungkapkan bahwa sistem pembayaran gratis ialah alat berbasis skrip yang telah usang awam pada perbankan. Beberapa instrumen pada kategori ini ialah cek, giro, debit serta kredit.

- Cek artinya perintah tidak bersyarat buat membayar sejumlah uang eksklusif.
- Bilyet Giro ialah surat perintah berasal nasabah pada kustodian buat memindahkan dana asal rekening ini ke rekening pemilik yang namanya diberikan.
- Nota Debet artinya alat yang digunakan buat menghimpun dana dari bank lain kepada bank pengirim tagihan atau pada nasabah bank.
- Nota kredit ialah alat yang dipergunakan buat mentransfer dana ke bank lain atas nama bank penerima atau nasabah.
- Wesel bank buat mentransfer, perintah pembayaran yang dikeluarkan sang bank khusus buat opsi transfer.

### 3. Sistem Pembayaran Dengan E-Money (Non-Tunai)

Berdasarkan dari (Lestari & Nofriantika, 2018), “uang elektronik ialah indera/alat pembayaran menggunakan unsur-unsur eksklusif yang dikeluarkan sesuai menggunakan nilai mata uang yang disimpan terlebih dahulu kemudian disimpan pada chip eksklusif, sehingga uang elektronika dapat dikelola menjadi alat uang elektronika. . pembayaran masa depan.” Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 mengatur uang elektro menjadi keliru satu cara pengaturan cashless society. Berdasarkan dari (Rustanto & Kartini, 2019) Penggunaan uang elektronik memudahkan transaksi.

(Pratama & Suputra, 2019) “mengatakan beberapa hal yang dapat mensugesti minat seorang pada menggunakan uang elektro diantaranya manfaat, kemudahan pengguna, serta kepercayaan pada memakai uang elektronika.” Sementara itu (mentari & Bendesa, 2018) “menemukan bahwa minat langsung dalam menggunakan e-money dipengaruhi oleh kesesuaian harga, pendapatan, kemudahan penggunaan dan utilitas penggunaan.” Studi mereka (Meileny & Wijasana, 2020) “menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan penggunaan, fungsi layanan serta agama berpengaruh positif terhadap minat penggunaan uang elektronika. berlawanan menggunakan penelitian” (Putra et al., 2016), “persepsi risiko berpengaruh negatif, sedangkan kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan uang elektronik.”

#### Keuntungan Pembayaran menggunakan Non-Tunai

Beberapa manfaat free payment yang bisa dirasakan UKM pada meningkatkan dan membuatkan usahanya artinya:

- a. Transaksi lebih cepat. Pembayaran nontunai mirip EDC, mobile wallet, uang elektro, online payment point, online banking serta lain-lain bisa mengurangi saat transaksi bagi pelanggan, sedangkan buat bisnis berarti antrian yang lebih pendek, biaya layanan yang lebih rendah serta pembagian kerja yang lebih efisien antar karyawan. Kemudahan ini pula bisa menyampaikan ketenangan pada pelanggan.
- b. Pencatatan transaksi menjadi lebih mudah serta sistematis. Sistem pembayaran non tunai dapat mencatat transaksi non digital secara digital, secara detail seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, mulai asal tanggal serta saat transaksi, jenis produk atau jasa, jumlah pembayaran. kapital yg dikeluarkan serta jumlah pembayaran yang wajib dilakukan oleh pelanggan.
- c. Permintaan pelanggan berbasis berita yang lebih spesifik/seksama. Pencatatan transaksi digital memberikan isu perihal permintaan pelanggan. Hal ini bermanfaat bagi pelaku UMKM buat memprediksi stok pembelian barang dan jasa pada masa mendatang sesuai minat serta kebutuhan pelanggan. Pengusaha menjadi lebih efisien dan efektif pada mengalokasikan modalnya, menghindari persediaan yg tidak terjual buat memberi ruang bagi laba yg lebih tinggi.

#### Kelemahan Pembayaran Non-Tunai

- a. Ada Batasan Setiap sistem pembayaran menggunakan memakai uang elektronika mempunyai batasan jumlah aporisma rekening. Jumlah transaksi yang Anda lakukan per hari serta juga jumlah pengeluaran.
- b. Risiko peretasan Mengikuti hukum keamanan menggunakan ancaman minimum bisa dibandingkan menggunakan risiko mirip pencurian. Lebih buruk lagi waktu sistem manajemen perusahaan runtuh. Ini karena mengarah di kebocoran lebih jelasnya kartu eksklusif dan juga pemiliknya. Bahkan Jika sistem pembayaran elektronika tak mengenalkan kartu plastik, Anda bisa terjebak dalam skandal pencurian identitas.
- c. Boros mekanisme atau sistem cashless cenderung membentuk Anda boros sebab sikap rakyat mempersepsikan uang sebagai pertukaran fisik. ketika membayar dengan kartu, tidak menyenangkan membelanjakan uang sebab tak ada uang tunai. Anda memerlukan koneksi internet menggunakan sistem pembayaran nontunai lainnya, Anda selalu membutuhkan koneksi internet. Tentu saja, Bila koneksi internet Anda terputus, Anda tidak akan dapat mengakses akun online Anda.

Adapun proses pembangunan berjalan setahap demi setahap dari era kemerdekaan menuju era serba digital mirip sekarang. terdapat masa pendudukan Belanda serta Jepang serta pada masa awal kemerdekaan, rakyat Indonesia mengenal 2 jenis sistem pembayaran, tunai serta nontunai. Pembayaran tunai dilakukan menggunakan uang kertas serta koin. Disamping itu, pelaksanaan pembayaran non tunai memakai sistem kliring. System kliring adalah jenis penyelesaian transaksional dan jua penyelesaian dengan mentransfer atau memindahkan sejumlah saldo eksklusif kepada orang yang berhak menerima saldo tersebut. Adapun beberapa tahapan pelaksanaan system kliring di Indonesia.

Pertama Sistem Kliring Manual, sistem kliring manual sudah digunakan secara terbatas pada daerah Jakarta Dari tahun 1908. Nilai transaksi nontunai dalam system kliring manual waktu itu masih rendah. oleh karena itu, proses perubahan uang kertas bisa dicatat menggunakan menggunakan sistem manual.

Kedua Sistem Semi Otomasi Kliring, ada pula sistem kliring semi-otomasi yang meliputi tempat kerja Bank Indonesia, beberapa bank peserta, serta jumlah uang kertas yg lebih poly. Sistem ini dikenal dengan Sistem

Semi Otomasi Kliring Lokal atau SOKL. Sistem ini dipergunakan di tahun 1980-an dan 1990-an.

Ketiga Sistem Otomasi Kliring, Sistem kliring otomasi adalah penerapan kliring lokal pada banyak sekali macam pemilihan warkat dan perhitungan pembuatan saldo kliring.

Keempat Sistem Kliring Elektroni , sistem di mana semua perhitungan lalu disesuaikan menggunakan perhitungan elektronika. dalam sistem ini pelaksanaannya meliputi penyusunan serta, perhitungan neraca (bilyet saldo kliring).

Dengan sistem yang jauh lebih mudah, sistem kliring elektronik bisa memproses kiriman pada jumlah yg lebih banyak. Selain itu, proses penagihan dapat diselesaikan dengan cepat, aman dan seksama. SKEJ sebagian dikerahkan di wilayah Jakarta pada tahun {1998-2000}. pada tahun {2001}, penggunaan SKEJ meluas ke luar wilayah Jakarta. pada tahun 2005, sistem kliring elektro yang disebut Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diluncurkan secara nasional. dalam sistem SKNBI, transfer dana dilakukan secara elektronika, serta penyelesaiannya bersifat nasional.

#### 4.2 Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran

Berdasarkan dari (Subari, 2017) “Secara awam beliau terlibat pada penyelenggaraan sistem pembayaran, khususnya menjadi penyusun kebijakan serta regulasi, aplikasi serta supervisi “oversight” agar mengelola risiko likuiditas dan kredit serta risiko sistemik”. Kebijakan serta pengembangan sistem pembayaran yg dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2012 dilakukan buat mempersiapkan peluncuran sistem {BI-RTGS} serta sistem {BI-RTGS} dengan mengutamakan empat aspek primer yaitu: H. mempertinggi keamanan, efisiensi, perluasan ketersediaan serta perlindungan konsumen. {SSSS-Generasi ke-2}, pengembanganNPG, interkoneksi internal, sosialisasi uang elektronika, persiapan pengenalan standar nasional untuk ATMberbasis chip serta kartu ATM/debit, perluasan akses BPR pada sistem pembayaran, dan penyempurnaan regulasi buat lebih ditingkatkan aplikasi aspek perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran.

Berdasarkan (Allen H. Lipis, 2020) “ATM ialah ATM yang dipasang di pada atau pada luar gedung bank, tanpa awak, dan bisa menghitung uang tunai serta memproses transaksi bank standar.” ATM Indonesia pula dikenal sebagai ATM. Pengembangan ini juga diperlukan dapat meningkatkan kapasitas manajemen risiko pada penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai akibatnya dapat beroperasi secara aman dan efisien. Efektifitas penyelenggaraan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II dicermati tak hanya berasal sisi penggunaan likuiditas, tetapi jua dari sisi infrastruktur sistem yang digunakan. Selain itu, kebijakan peningkatan keamanan jua dilakukan menggunakan mempersiapkan pengenalan standar nasional dengan kartu ATM/debit yang memakai teknologi chip serta kode PIN minimal 6 (dari enam) digit.

Sasarannya merupakan buat sepenuhnya menerapkan penggunaan standar nasional buat ATM serta kartu ATM/bank dengan teknologi chip pada akhir tahun 2015. Teknologi chip berjasa mengurangi kejahatan (penipuan) melalui sistem infrastruktur kartu ATM dan ATM/kartu debit, termasuk skimming. Tentunya, praktik ini pula dimaksudkan buat melindungi warga pengguna ATM serta kartu ATM/debit.

**Tabel 2. Data Transaksi Menggunakan Kartu Debit (2020-2021)**

PERIODE	NOMINAL TRANSAKSI TUNAI	NOMINAL TRANSAKSI BELANJA	NOMINAL TRANSAKSI TRANSFER
{2020-Q1}	“43,65%”	“4,63%”	“51,72%”
{2020-Q2}	“43,73%”	“3,42%”	“52,86%”
{2020-Q3}	“43,26%”	“4,05%”	“52,69%”
{2020-Q4}	“42,45%”	“4,26%”	“53,29%”
{2021-Q1}	“41,05%”	“4,28%”	“54,67%”

#### 4.3 Resiko-Resiko Dalam Sistem Pembayaran

Semua aktivitas pasti mengandung risiko tertentu, terutama aktivitas pembayaran dan sistem pembayaran. Risiko terbesar terhadap sistem pembayaran di negara mana pun di dunia adalah kegiatan penyelesaian, kliring, penyelesaian dan pencatatan sistem keuangan dan bank sentral. Kebijakan risiko sistem pembayaran harus mendorong keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, pembayaran, kliring dan pencatatan (secara bersama-sama disebut sebagai infrastruktur pasar keuangan), dan stabilitas keuangan secara lebih luas. Secara umum, terdapat dua jenis risiko dalam sistem pembayaran: risiko kredit dan risiko likuiditas.



Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lawan tidak akan dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayarannya pada saat jatuh tempo atau di masa mendatang. Risiko likuiditas, di sisi lain, adalah risiko bahwa rekanan tidak akan dapat membayar penuh pada saat jatuh tempo dan (mungkin) akan membiayainya setelah jatuh tempo. Ini terjadi secara alami. Masalah likuiditas dengan “counterparty” penerima dapat meningkatkan pendanaan “counterparty” karena harus mencarinya di pasar keuangan. Likuiditas lembaga keuangan dapat terpengaruh secara negatif jika peringkat kreditnya menurun, arus kas yang tidak terduga terjadi, atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain menghindari berbisnis dengan atau meminjamkan kepada lembaga keuangan tersebut.

Perusahaan juga dapat terkena risiko solvabilitas jika solvabilitas pasar di mana mereka berpartisipasi menurun. Selain itu, manajemen risiko yang diperlukan membantu mengurangi berbagai risiko di industri tertentu ke tingkat yang dapat diterima secara sosial. Ini bisa berupa berbagai ancaman dari lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Keamanan membutuhkan teknologi kriptografi canggih yang sangat didasarkan pada teori matematika dan aplikasi komputer.

Algoritme kriptografi dikembangkan dengan mempertimbangkan ketahanan komputasi, membuatnya sangat sulit bagi penyerang untuk memecahkannya. Secara teoritis, sangat sulit untuk memecahkan sistem enkripsi. Karena itu, sistem ini dianggap sangat andal. Kemajuan teoretis telah meningkatkan algoritme faktorisasi bilangan bulat dan meningkatkan teknologi komputasi yang membutuhkan penyempurnaan solusi secara konstan. Ada sistem keamanan yang sama sekali tidak dapat ditembus bahkan dengan pemrosesan data yang tidak terbatas, tetapi sistem ini sangat sulit diterapkan.

#### **4.4 Upaya Untuk Menjaga atau Menstabilkan Sistem Pembayaran**

Menjaga sistem pembayaran ialah galat/alat satu kewajiban Bank Indonesia (BI). Maka berasal itu buat mengatur serta menjaga kelancaran fungsi sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) berwenang buat. Pertama menyadari dan menerbitkan persetujuan serta persetujuan atas penyelenggaraan sistem pembayaran. ke 2 Penyelenggara sistem pembayaran harus melaporkan kegiatannya. Ketiga memutuskan indera pembayaran yang digunakan. Selain itu, BI berwenang mengatur sistem interbank settlement dalam rupiah atau valuta asing serta memutuskan jenis, harga, karakteristik, bahan baku yang dipergunakan, serta tanggal efektif uang yang akan dikeluarkan menjadi indera pembayaran yang legal.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sistem pembayaran. Berdasarkan dari (Listfield dan Montes Negretin Laila Ramadhani, 2016) “Sistem pembayaran artinya peraturan, baku serta indera yang dipergunakan agar pertukaran nilai ekonomi antara 2 pihak untuk menghindari kewajiban.” Norma guna sistem pembayaran, semula dari transfer uang, bank serta kartu kredit sampai “QRIS” diatur buat meminimalisir risiko penyalahgunaan. Dan untuk menghindari konflik berfokus tadi, Bank Indonesia terus menyebarkan mekanisme yang dapat memitigasi banyak sekali risiko pada sistem pembayaran. Di Indonesia, mata uang masih memegang peranan krusial pada pembayaran, terutama transaksi bernilai rendah. Kebijakan sistem pembayaran. Berdasarkan dari (Subari, 2017) “Secara umum beliau terlibat pada penyelenggaraan sistem pembayaran, khususnya menjadi penyusun kebijakan serta regulasi, aplikasi serta supervisi “oversight” agar mengelola risiko likuiditas dan kredit serta risiko sistemik”. Maka berasal itu buat mengatur serta menjaga kelancaran fungsi sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) berwenang buat

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami dapat membuat rekomendasi yang dapat membantu Bank Indonesia dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan kata lain, menyeimbangkan nilai tukar rupiah dan prosedur pasar, mengatur kelancaran sistem pembayaran, dan mendukung kegiatan proaktif yang dapat menghindari masalah yang tidak diinginkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Asmaaysi, Alifian. (2022). Tugas, Tujuan dan Peran Bank Indonesia. Jakarta. Diakses 3 Maret 2023.
- [2] Paulus H, Darminto, Susila Y, Atmaja. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jurnal Masalah - Masalah Hukum. Semarang. Volume 51 No. 3, 271-286.
- [3] Talbani F, Meutia H.,DKK. (2021). Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI). Volume 5 No. 2, 171-182.
- [4] Humaniora MT. (2020). Tugas dan Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral. Jakarta. Diakses 3 maret 2023.

- [5] Mulyana VK, Putri. (2022). 12 Pengertian Bank Menurut Para Ahli.Kompas.com. Jakarta. Diakses 3 Maret 2023.
- [6] Iswanto B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia*. Volume 9 No. 2, 421- 439.
- [7] Rilda, Murniati (2013). Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7 No. 3, 304-316.
- [8] Marulak P. (2021). Aspek Hukum Kekaratinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Legal Aspects Of Health Quarantine And Consumer Protection In Treatment Of Covid-19 Pandemic). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 21 No. 1, 23-44.
- [9] Hamidi, Sukirman, Prabowo RR. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Bank Umum Kota Surakarta. *Jurnal Penelitian UNS*. Volume 2 No. 1, 119-130.
- [10] Silitonga, Prasetya R, E.RSY., DKK. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Dki Jakarta. Bank Sentral Republik Indonesia BI. Jakarta.
- [11] Agung P, Mulyati A, N.R. (2018). Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. *Majalah Ilmiah Bijak*. Volume 15 No. 2, 127-137.
- [12] Syarifuddin, Ferry. (2015). Konsep Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia. Bibliografi, Jakarta.
- [13] Tawakalni, Dewani I. (2020). Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Jakarta.
- [14] Sofyan M Abidin. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. Bank Indonesia (BI). Surabaya.
- [15] Mutiara Jannati. (2016). Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Kredit Modal Kerja Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Cabang Ujung Batu. Fakultas Syariah & Hukum.
- [16] Daruri A. (2016). Memahami Resiko Dalam Sistem Pembayaran. Surabaya. Diakses 4 maret 2023.
- [17] Lydea M. (2013). Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia. Bandung. Diakses 4 maret 2023.
- [18] Padede M. (2021). Aspek Hukum Kekaratinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 21 Nomor 1, Maret 2021 P-ISSN: 1410-5632, E- ISSN:2579-8561 Terakreditasi Nasional No: 10/E/KPT/2019. Jakarta.
- [19] Niode AO, Rotinsulu TO, Puspitasari ANF. (2021). Analisis Pengaruh Pembayaran Non-Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. *Jurnal EMBA*. Vol.9 No.2 April 2021, ISSN 2303-1174. Sulawesi Utara.
- [20] Mahendra OC. (2019). Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri. Sumatra Utara.
- [21] Paulus H, Darminto, Susila Y A. (2022). Partisipan Bank Indonesia Dalam Mengatur Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*. Volume 51 No. 3.
- [22] Abidin M S. (2014). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- [23] Arista R S.(2020). Peranan Bank Indonesia(BI) Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran Dan Melindungi nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Skimming. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Unniversitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- [24] Kuncara, T., & Agustina, R. (2022). Analysis of Cov-19 Impact on Financial Performance at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT. Bank Central Asia, Tbk for 2016-2020 Using Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) Methods. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 59-66.
- [25] Rosalina E,W. (2020) . Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke Non-Tunai/Online Payment Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi pada UMKM di Yogyakarta). In: Seminar Nasional dan Call For Paper 2020 : “Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0”. STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, pp. 187-200. ISBN 978-602-51174-9-7.
- [26] Pranawukir, I., & Sukma, A. H. (2021). Strategi Corporate Social Responsibility Dompot Dhuafa dalam Membangun Brand Differentiation Lembaga. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(1), 22-32.